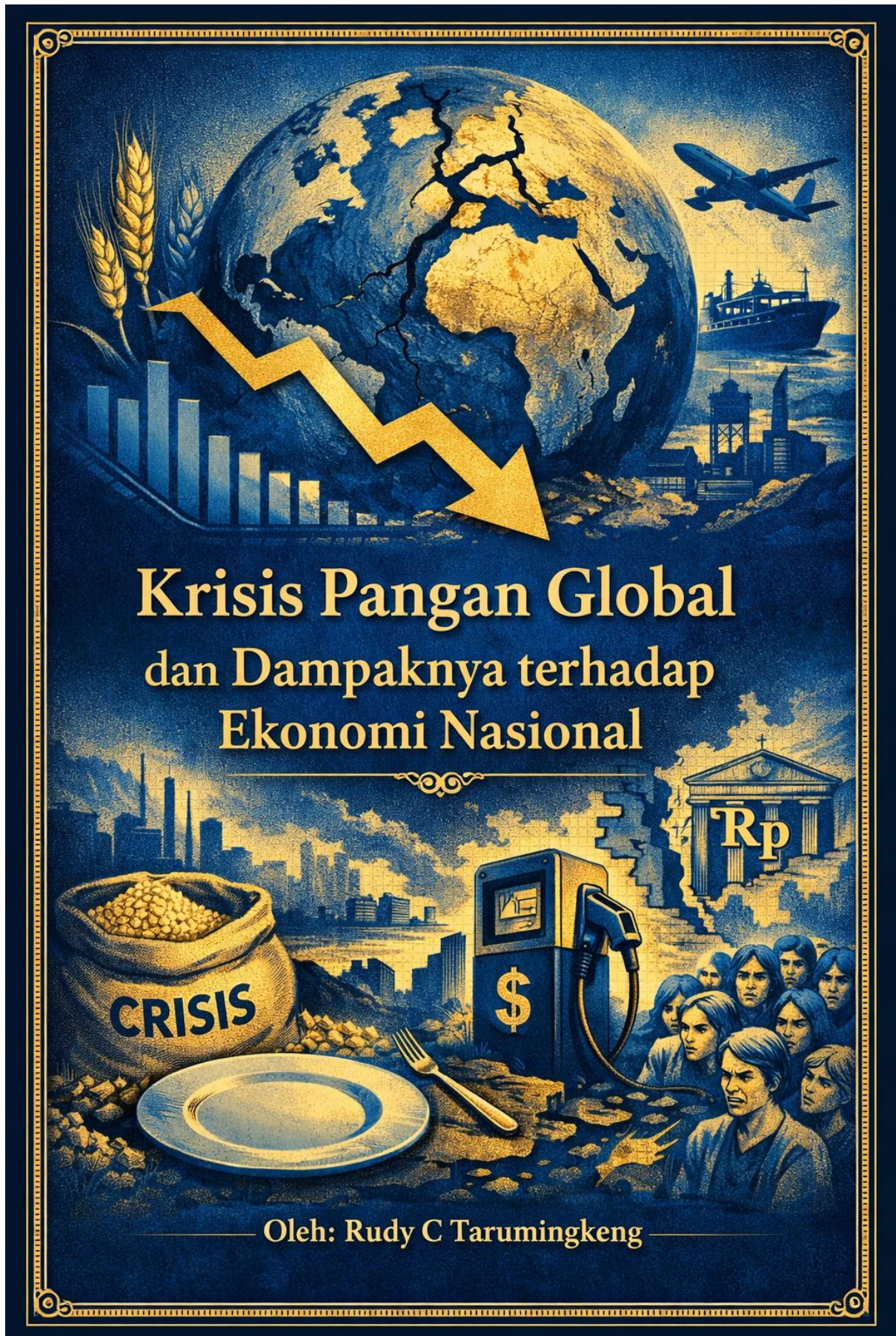




Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

29 March 2026

KRISIS PANGAN GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI NASIONAL

Abstrak

Krisis pangan global pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai peristiwa kelangkaan fisik pangan, melainkan sebagai krisis multidimensi yang melibatkan harga, akses, distribusi, konflik, perubahan iklim, biaya input, dan ketimpangan daya beli. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi situasi paradoks: di satu sisi sebagian harga komoditas pangan internasional mulai melunak pada 2025, tetapi di sisi lain kelaparan, kerawanan pangan, dan ketidakmampuan membeli diet sehat tetap tinggi. Laporan SOFI 2025 menunjukkan sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan pada 2024, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, dan sekitar 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. Sementara itu, Global Report on Food Crises 2025 mencatat lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan teritori mengalami kelaparan akut pada 2024, didorong oleh konflik, guncangan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perpindahan penduduk. Makalah ini bertujuan menjelaskan hakikat krisis pangan global, menguraikan mekanisme transmisinya ke ekonomi nasional, serta menganalisis dampaknya terhadap Indonesia. Secara konseptual, pembahasan

berangkat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kerangka food systems dari OECD dan World Bank, serta temuan FAO, WFP, WHO, BPS, Bank Indonesia, Bappenas, dan Badan Pangan Nasional. Makalah ini berargumen bahwa dampak krisis pangan terhadap ekonomi nasional tidak bekerja hanya melalui jalur inflasi, tetapi juga melalui biaya produksi, kesejahteraan rumah tangga miskin, tekanan fiskal, kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, sekalipun inflasi umum 2025 berada dalam sasaran dan produksi padi nasional meningkat, tekanan pangan tetap tampak pada inflasi volatile food, kenaikan harga grosir hasil pertanian, serta besarnya sensitivitas rumah tangga miskin terhadap harga bahan makanan. Karena itu, respons kebijakan tidak cukup berupa operasi pasar jangka pendek, tetapi harus mencakup penguatan produksi domestik, logistik, cadangan pangan, data pangan, perlindungan sosial adaptif, dan transformasi sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. ([FAOHome](#))

Kata kunci: *krisis pangan global, inflasi pangan, ketahanan pangan, ekonomi nasional, Indonesia, stabilitas sosial*

Krisis Pangan Global dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional

Pendahuluan

Pangan selalu menempati posisi yang sangat khusus dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Tidak seperti banyak komoditas lain, pangan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup, kesehatan, produktivitas, dan stabilitas sosial. Karena itu, ketika dunia berbicara tentang krisis pangan, yang dipertaruhkan bukan hanya volume pasokan, tetapi juga kemampuan rumah tangga untuk membeli makanan, kemampuan negara menjaga keterjangkauan, serta kemampuan sistem

ekonomi mempertahankan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Rumusan ini menunjukkan bahwa persoalan pangan sejak awal memang bersifat ekonomi, sosial, dan politik sekaligus. ([Peraturan BPK](#))

Dalam konteks global terkini, krisis pangan tidak identik dengan satu gambaran tunggal. Pada wilayah-wilayah konflik dan negara rapuh, krisis tampil sebagai kelaparan akut dan ancaman kemanusiaan. Pada negara berkembang yang relatif stabil, krisis lebih sering tampil sebagai tekanan harga, penurunan kualitas diet, dan melemahnya daya beli kelompok rentan. SOFI 2025 menunjukkan bahwa kemajuan global melawan kelaparan memang ada, tetapi sangat lambat dan tidak merata: sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan pada 2024, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, dan 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. FAO juga menegaskan bahwa sejak 2020 inflasi harga pangan secara konsisten melampaui inflasi umum, yang menyoroti kerentanan khusus sistem pangan dalam lanskap makroekonomi global. ([FAOHome](#))

Bagi Indonesia, persoalan ini sangat relevan. Sebagai negara berpenduduk besar, kepulauan, dan masih memiliki jutaan rumah tangga rentan, Indonesia tidak dapat menilai krisis pangan global sebagai peristiwa yang jauh. Gangguan pada harga dan pasokan global dapat masuk ke dalam perekonomian domestik melalui harga bahan baku pangan, biaya distribusi, ekspektasi inflasi, dan perubahan kesejahteraan rumah tangga. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kapasitas penyangga domestik melalui produksi padi, kebijakan stabilisasi, cadangan pangan, dan perlindungan sosial. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah krisis pangan global akan berdampak, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap

ekonomi nasional dan seberapa kuat kapasitas institusi nasional untuk meredamnya. ([Badan Pangan Nasional](#))

Makalah ini disusun untuk membahas tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana krisis pangan global harus dipahami secara konseptual dalam era sekarang. Kedua, melalui jalur apa krisis tersebut memengaruhi ekonomi nasional. Ketiga, bagaimana dampak itu tampak dalam konteks Indonesia, baik pada inflasi, daya beli, kemiskinan, produksi, maupun respons kebijakan. Dengan kerangka ini, makalah berupaya menunjukkan bahwa krisis pangan global bukan isu sektor pertanian semata, melainkan ujian atas ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh. ([OECD](#))

1. Kerangka Konseptual: dari Kelangkaan ke Krisis Sistem Pangan

Dalam literatur kontemporer, krisis pangan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kegagalan produksi. OECD menekankan bahwa sistem pangan harus dibaca melalui tiga sasaran yang saling berkaitan: ketahanan pangan dan gizi, penghidupan para pelaku, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan ini, sebuah negara dapat saja memiliki produksi yang cukup, tetapi tetap menghadapi krisis bila distribusi buruk, harga melonjak, kualitas diet memburuk, atau kelompok miskin kehilangan akses. Dengan kata lain, krisis pangan adalah krisis sistem pangan, yaitu krisis pada hubungan antara produksi, pasar, pendapatan, logistik, kebijakan, dan konsumsi. ([OECD](#))

Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa penurunan harga komoditas internasional tidak otomatis mengakhiri krisis pangan. World Bank dalam *Food Security Update* Oktober dan Desember 2025 mencatat bahwa harga pangan komoditas global memang menurun pada sebagian kelompok, bahkan harga beras dan gandum pada akhir 2025 lebih rendah dibanding setahun sebelumnya. Namun laporan yang sama menekankan bahwa biaya input masih tinggi, margin petani tertekan, dan perubahan harga domestik tidak selalu mengikuti tren global karena konflik lokal serta faktor ekonomi setempat. Jadi, krisis pangan dapat bertahan walaupun

harga internasional mulai mereda, karena persoalan utamanya sering kali terletak pada transmisi domestik, daya beli, dan struktur pasar.

FAO melalui SOFI 2025 bahkan memberi penekanan khusus pada inflasi pangan sebagai faktor makroekonomi yang merusak akses terhadap pangan bergizi. Laporan itu menegaskan bahwa sejak 2020 inflasi pangan terus melampaui inflasi umum, dan kelompok berpendapatan rendah menanggung dampak paling besar karena proporsi pendapatan mereka yang dibelanjakan untuk makanan jauh lebih tinggi. Dalam pengertian ini, krisis pangan modern lebih tepat disebut sebagai krisis keterjangkauan dan krisis mutu akses, bukan sekadar krisis ketersediaan fisik. Itulah sebabnya 2,6 miliar orang masih belum mampu membeli diet sehat meskipun tidak semua hidup di negara yang mengalami gagal panen atau perang.

([FAOHome](#))

2. Krisis Pangan Global Kontemporer: skala, pendorong, dan paradoks

Besarnya skala krisis global tampak dari dua indikator yang saling melengkapi. Pertama, indikator kronis dari SOFI 2025 menunjukkan bahwa sekitar 673 juta orang mengalami kelaparan pada 2024 dan sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat. Kedua, indikator akut dari Global Report on Food Crises 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan teritori mengalami kelaparan akut pada 2024, naik 13,7 juta dibanding 2023. Dengan demikian, dunia menghadapi dua lapis krisis sekaligus: krisis kronis yang berkaitan dengan kemiskinan, inflasi, dan diet sehat; serta krisis akut yang berkaitan dengan konflik, cuaca ekstrem, dan keruntuhan sistem lokal. ([FAOHome](#))

Pendorong krisis itu juga semakin kompleks. WFP dan jaringan GRFC menyebut konflik, guncangan ekonomi, ekstrem iklim, dan perpindahan paksa sebagai faktor utama memburuknya kelaparan akut pada 2024. FAO, WHO, dan mitranya menambahkan bahwa lonjakan inflasi 2021–2023 dipengaruhi kombinasi respons fiskal dan moneter pascapandemi, perang di Ukraina, serta cuaca ekstrem. World Bank menambahkan bahwa biaya input pertanian, terutama pupuk, tetap tinggi sepanjang 2025, sehingga

walaupun harga komoditas output menurun, petani di banyak tempat tidak otomatis lebih sejahtera. Kombinasi antara harga jual yang melunak dan biaya produksi yang tetap tinggi justru menekan profitabilitas dan berpotensi menurunkan pemakaian input serta hasil panen musim berikutnya. (wfp.org)

Di sinilah paradoks utama krisis pangan global tampak. Pada akhir 2025, pasar global untuk gandum dan beras menurut AMIS serta World Bank relatif tersuplai dengan baik; harga gandum tercatat 3 persen lebih rendah dan harga beras 29 persen lebih rendah dibanding setahun sebelumnya. Namun pada saat yang sama, FAO masih menekankan bahwa 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat, dan bahwa kerawanan pangan global baru turun sangat tipis menjadi sekitar 28,0 persen. Paradoks ini menegaskan bahwa problem utamanya bukan sekadar "ada atau tidak ada komoditas di pasar dunia", melainkan apakah penurunan harga global benar-benar diteruskan ke tingkat domestik dan apakah rumah tangga punya pendapatan yang cukup untuk memanfaatkannya.

Krisis pangan global juga memiliki dimensi kualitas konsumsi. WHO menekankan bahwa diet sehat harus aman, beragam, seimbang, dan cukup, serta bahwa perubahan sistem pangan dan urbanisasi telah mendorong konsumsi makanan yang lebih banyak diproses, tinggi gula, garam, dan lemak, sementara buah, sayur, dan serat sering kali tidak cukup. Artinya, ketika harga pangan naik, rumah tangga tidak hanya berisiko makan lebih sedikit, tetapi juga berisiko mengalihkan konsumsi ke makanan yang lebih murah namun kurang sehat. Dalam jangka pendek hal ini dapat mempertahankan rasa kenyang; dalam jangka panjang hal ini memperbesar beban malnutrisi dan penyakit tidak menular. ([World Health Organization](http://WorldHealthOrganization))

3. Mekanisme Transmisi ke Ekonomi Nasional

Dampak krisis pangan global terhadap ekonomi nasional bekerja melalui beberapa jalur. Jalur pertama adalah inflasi. Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi Indonesia dapat dipicu tekanan sisi penawaran, termasuk

depresiasi nilai tukar, imported inflation, kenaikan harga komoditas internasional, bencana alam, dan gangguan distribusi. Dalam struktur inflasi Indonesia, kelompok *volatile food* memang secara definisional sangat dipengaruhi panen, gangguan alam, dan perkembangan harga pangan domestik maupun internasional. Karena itu, gejolak global pada pangan dan input pertanian mudah sekali diteruskan ke inflasi domestik, meskipun besarnya bergantung pada kondisi panen, logistik, dan intervensi kebijakan nasional. ([Bank Indonesia](#))

Jalur kedua adalah biaya produksi. Ketika pupuk, energi, pakan, atau bahan baku impor naik, biaya usaha pertanian, peternakan, dan industri pangan ikut meningkat. World Bank mencatat bahwa harga pupuk meningkat hampir setiap bulan pada 2025 dan pada triwulan III-2025 sekitar 30 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Bila produsen tidak mampu meneruskan kenaikan biaya itu ke harga jual, margin mereka tertekan; bila mereka meneruskannya, konsumen menghadapi harga lebih tinggi. Dalam kedua skenario itu, ekonomi nasional terdampak: entah melalui penurunan insentif produksi atau melalui inflasi konsumen.

Jalur ketiga adalah perdagangan dan neraca biaya impor. BPS mencatat bahwa impor Indonesia selama Januari–November 2025 mencapai USD 218,02 miliar, naik 2,03 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan impor nonmigas mencapai USD 188,61 miliar dan tumbuh 4,37 persen. Walaupun angka ini tidak hanya mencerminkan pangan, ia menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap terhubung kuat pada pasar bahan baku dan barang perantara internasional. Dalam situasi krisis pangan global, ketergantungan pada bahan baku impor tertentu—termasuk beberapa komponen pangan dan inputnya—dapat memperbesar tekanan biaya dan membuat stabilitas harga domestik lebih sulit dijaga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Jalur keempat adalah daya beli dan kemiskinan. BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia masih 23,85 juta orang atau 8,47 persen, dengan garis kemiskinan rata-rata Rp609.160 per

kapita per bulan. BPS juga menekankan bahwa garis kemiskinan dihitung dari kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Ini berarti rumah tangga miskin dan hampir miskin sangat sensitif terhadap harga bahan makanan. Kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, cabai, atau gula dapat dengan cepat mempersempit konsumsi riil, bahkan bila inflasi agregat nasional tampak rendah. Maka, dampak krisis pangan terhadap ekonomi nasional tidak hanya terbaca dalam indeks harga, tetapi juga dalam melemahnya kesejahteraan rumah tangga rentan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Jalur kelima adalah kualitas modal manusia. WHO menegaskan bahwa diet sehat sepanjang daur hidup membantu mencegah malnutrisi dan penyakit tidak menular, sedangkan pola makan yang terbentuk sejak anak-anak cenderung berlanjut hingga dewasa. Jika krisis pangan mendorong rumah tangga terus-menerus memilih makanan murah tetapi miskin gizi, maka dampaknya bergerak dari pasar ke ruang kelas, dari meja makan ke produktivitas kerja. Dalam jangka panjang, krisis pangan yang tidak tertangani dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. ([World Health Organization](#))

4. Dampak terhadap Ekonomi Nasional Indonesia

Dalam konteks Indonesia, salah satu dampak paling nyata terlihat pada inflasi pangan. Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi IHK 2025 tetap berada dalam sasaran, tetapi inflasi *volatile food* pada akhir 2025 masih sebesar 6,21 persen tahun-ke-tahun. Pada Desember 2025, kenaikan bulanan inflasi terutama disumbang kelompok *volatile food* dan *administered prices*; komoditas yang banyak disebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah, dipengaruhi gangguan cuaca, tingginya harga input ternak, dan naiknya permintaan musiman. Ini menunjukkan bahwa sekalipun makroekonomi berhasil menjaga inflasi headline, sisi pangan tetap menjadi sumber tekanan yang sangat sensitif. ([Bank Indonesia](#))

Tekanan itu berlanjut pada awal 2026 dengan pola yang berubah. Bank Indonesia pada Februari 2026 melaporkan inflasi *volatile food* sebesar 4,64 persen tahun-ke-tahun, naik dari 1,14 persen pada Januari 2026. Sementara itu, BPS mencatat bahwa Indeks Harga Perdagangan Besar Februari 2026 naik 2,41 persen tahun-ke-tahun, dengan kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan naik paling tinggi sebesar 5,51 persen; harga beras, jagung, bawang merah, dan telur ayam ras menjadi pendorong utama. Data ini penting karena memperlihatkan bahwa tekanan pangan tidak hanya muncul di tingkat konsumen, tetapi juga di tingkat grosir dan hulu produksi. ([Bank Indonesia](#))

Dampak ekonomi berikutnya berkaitan dengan daya beli dan kemiskinan. Walaupun kemiskinan nasional menurun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, angka absolut 23,85 juta orang masih menunjukkan besarnya kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan harga makanan. Dengan garis kemiskinan Rp609.160 per kapita per bulan dan rata-rata rumah tangga miskin 4,72 anggota, ruang konsumsi mereka sangat sempit. Karena itu, guncangan harga pangan dapat dengan cepat mendorong rumah tangga nyaris miskin masuk ke bawah garis kemiskinan, atau memaksa rumah tangga miskin menurunkan mutu konsumsi mereka. Dalam perspektif ekonomi nasional, ini berarti gejolak pangan berpotensi mengikis hasil pertumbuhan dan memperbesar kerentanan sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, Indonesia juga menunjukkan kapasitas penyangga domestik. BPS melaporkan bahwa produksi padi 2025 mencapai 60,21 juta ton GKG, naik 13,29 persen dari 2024, dan bila dikonversi menjadi beras untuk konsumsi pangan mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton. Kenaikan produksi ini penting karena memperkuat ketersediaan domestik dan mengurangi tekanan yang berasal dari pasar global, terutama pada komoditas yang memang diproduksi kuat di dalam negeri. Ini berarti dampak krisis pangan global terhadap ekonomi nasional tidak bersifat satu arah; ia sangat

dipengaruhi oleh kapasitas produksi domestik yang berhasil dibangun.
([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Meskipun demikian, peningkatan produksi domestik tidak otomatis menyelesaikan semua masalah. World Bank menekankan bahwa perubahan harga domestik tidak selalu mengikuti tren global karena konflik lokal dan faktor ekonomi dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, tantangan geografis kepulauan, disparitas logistik, fluktuasi cuaca, dan variasi waktu panen antarwilayah membuat daerah defisit tetap dapat mengalami lonjakan harga sekalipun tingkat produksi nasional naik. Jadi, keberhasilan produksi perlu dibedakan dari keberhasilan distribusi dan keterjangkauan. Dalam ekonomi nasional, justru celah antara tiga hal inilah yang sering menentukan apakah gejolak global akan menjadi inflasi domestik yang serius atau hanya gangguan terbatas.

Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap tumbuh 5,11 persen, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun. Capaian ini penting karena menunjukkan bahwa perekonomian nasional secara agregat tetap ekspansif di tengah ketidakpastian global. Akan tetapi, pertumbuhan agregat tidak dengan sendirinya meniadakan kerentanan pangan. Bahkan, bila harga pangan naik lebih cepat daripada pendapatan kelompok bawah, maka manfaat pertumbuhan akan terdistribusi tidak merata. Dengan demikian, krisis pangan global bisa menjadi faktor yang mengurangi kualitas pertumbuhan: ekonomi tetap tumbuh, tetapi rumah tangga rentan merasa hidup makin berat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5. Respons Kebijakan Indonesia

Respons Indonesia terhadap tekanan pangan mencerminkan pemahaman bahwa masalah ini harus ditangani secara lintas lembaga. Bank Indonesia menegaskan bahwa sasaran inflasi dicapai melalui koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral, serta dukungan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Dalam siaran Februari 2026, BI juga menyebut bahwa pengendalian inflasi pangan ditopang sinergi BI dengan TPIP/TPID serta

penguatan implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan. Ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak bisa dibebankan pada suku bunga semata, karena faktor penentunya berada di sisi pasokan, distribusi, dan kelembagaan. ([Bank Indonesia](#))

Di sisi pangan secara langsung, Badan Pangan Nasional menyiapkan intervensi berbasis cadangan dan operasi stabilisasi. Pada 2026 pemerintah menetapkan target Cadangan Pangan Pemerintah antara lain 4 juta ton beras, 1 juta ton jagung, 70 ribu ton kedelai, 275 ribu ton gula konsumsi, dan 790 ribu ton minyak goreng. Secara ekonomi, cadangan seperti ini berfungsi sebagai bantalan pasar: ia memberi ruang bagi negara untuk melakukan intervensi saat gejolak harga muncul, sehingga transmisi krisis global ke harga domestik dapat diredam. Secara sosial, cadangan juga menjadi instrumen kepercayaan bahwa negara memiliki kapasitas bertindak ketika pasar tidak stabil. ([Badan Pangan Nasional](#))

Bappenas, di sisi lain, mendorong respons yang lebih struktural. Pada akhir 2024 dan sepanjang 2025, Bappenas menegaskan bahwa transformasi sistem pangan merupakan prioritas RPJMN 2025–2029, dengan penekanan pada kemandirian pangan, inovasi teknologi pertanian, penguatan gizi, dan keberlanjutan. Dalam kerja sama dengan IFPRI dan FAO, arah kebijakannya tidak hanya menambah produksi, tetapi juga memperkuat sistem pangan agar lebih resilien, inklusif, dan bernutrisi. Ini penting karena krisis pangan global tidak bisa diatasi dengan pendekatan ad hoc semata; ia memerlukan transformasi sistem, dari hulu sampai hilir. ([Bappenas](#))

6. Agenda Strategis ke Depan

Pelajaran utama dari krisis pangan global ialah bahwa ekonomi nasional memerlukan arsitektur ketahanan pangan yang lebih canggih daripada sekadar menjaga stok beras. Pertama, Indonesia perlu terus meningkatkan produksi pangan domestik yang memang memiliki basis agroekologi kuat, sembari mengurangi kerentanan terhadap komoditas dan input yang sangat dipengaruhi pasar dunia. Kenaikan produksi padi 2025 menunjukkan bahwa penguatan produksi domestik masih sangat relevan

sebagai bantalan strategis. Namun penguatan itu harus berbasis produktivitas, efisiensi air, dukungan teknologi, dan adaptasi iklim, agar tidak hanya besar di angka tetapi juga berkelanjutan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kedua, logistik dan distribusi harus dipandang sebagai bagian inti dari kebijakan pangan. Bank Indonesia sendiri memasukkan gangguan distribusi sebagai salah satu sumber inflasi sisi penawaran, sedangkan World Bank menegaskan bahwa perubahan harga domestik tidak selalu mengikuti tren global karena faktor lokal. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, masalah pangan sering kali bukan ketiadaan nasional, melainkan keterputusan antarwilayah. Karena itu, investasi pada gudang, konektivitas, transportasi dingin, data stok real time, dan fasilitasi distribusi antarwilayah akan sama pentingnya dengan investasi pada lahan dan benih. ([Bank Indonesia](#))

Ketiga, perlindungan sosial perlu dirancang adaptif terhadap guncangan harga pangan. Data BPS tentang kemiskinan Maret 2025 menunjukkan masih besarnya populasi yang rentan. Dalam konteks itu, bantuan sosial, intervensi pangan, dan dukungan pendapatan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika harga, bukan bekerja dengan asumsi situasi normal yang statis. Tanpa instrumen seperti ini, setiap gejolak global akan lebih mudah berubah menjadi krisis konsumsi domestik. Ketahanan ekonomi nasional pada akhirnya diukur bukan hanya dari pertumbuhan, tetapi dari kemampuan melindungi kelompok paling rentan dari guncangan yang datang dari luar negeri. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keempat, Indonesia perlu memperluas orientasi kebijakan dari “cukup makan” ke “makan sehat dan aman”. SOFI 2025 dan WHO sama-sama menekankan bahwa problem pangan dunia saat ini tidak hanya kelaparan, tetapi juga keterjangkauan diet sehat dan memburuknya kualitas konsumsi. Jika kebijakan hanya mengejar kalori murah, maka bangsa dapat lolos dari kelaparan terbuka tetapi tetap menanggung beban stunting, anemia, obesitas, dan produktivitas rendah. Karena itu, ketahanan pangan nasional

idealnya dipahami sebagai ketahanan gizi. Dalam jangka panjang, inilah yang akan menentukan mutu sumber daya manusia dan daya saing ekonomi Indonesia. ([FAOHome](#))

Penutup

Krisis pangan global masa kini adalah krisis yang kompleks: ia merupakan kombinasi antara kelaparan kronis, kelaparan akut, inflasi pangan, tingginya biaya input, konflik, perubahan iklim, dan lemahnya daya beli. Data global 2024–2025 menunjukkan bahwa meskipun beberapa harga komoditas internasional mulai menurun, dunia masih jauh dari aman secara pangan. Sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, dan lebih dari 295 juta orang mengalami kelaparan akut di 53 negara dan teritori. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa pasar global yang relatif lebih tenang belum cukup untuk memulihkan ketahanan pangan dunia. ([FAOHome](#))

Bagi Indonesia, dampak krisis itu nyata tetapi tidak seragam. Ia tampak pada inflasi *volatile food*, kenaikan harga grosir hasil pertanian, sensitivitas rumah tangga miskin terhadap harga makanan, dan kebutuhan kebijakan stabilisasi yang terus-menerus. Pada saat yang sama, Indonesia juga menunjukkan kapasitas penyangga melalui pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025, peningkatan produksi padi, cadangan pangan pemerintah, serta koordinasi inflasi pusat-daerah. Dengan demikian, krisis pangan global tidak harus bermetamorfosis menjadi krisis ekonomi nasional yang mendalam, asalkan kapasitas produksi, logistik, stabilisasi, dan perlindungan sosial terus diperkuat. ([Bank Indonesia](#))

Akhirnya, makalah ini menegaskan bahwa pangan harus ditempatkan sebagai isu strategis ekonomi nasional. Krisis pangan global bukan sekadar urusan pertanian, melainkan urusan inflasi, kemiskinan, kualitas manusia, dan ketahanan negara. Negara yang mampu menjaga pangan tetap tersedia, terjangkau, bergizi, dan stabil akan memiliki fondasi sosial yang lebih kokoh untuk tumbuh. Sebaliknya, negara yang menganggap pangan

hanya sebagai komoditas biasa akan lebih mudah diguncang oleh volatilitas global. Karena itu, jawaban atas krisis pangan global bukan hanya menambah suplai, tetapi membangun sistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan adil. ([Peraturan BPK](#))

Glosarium

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Persediaan pangan yang dikelola negara untuk menjaga stabilitas pasokan, merespons keadaan darurat, dan melakukan intervensi pasar.

Diet sehat

Pola konsumsi yang aman, beragam, seimbang, dan cukup, yang membantu mencegah malnutrisi dan penyakit tidak menular.

Food systems

Keseluruhan sistem yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan, konsumsi, dan dampak sosial-lingkungan dari pangan.

Inflasi pangan

Kenaikan harga pangan yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu dan memengaruhi daya beli masyarakat.

Kerawanan pangan akut

Keadaan ketika rumah tangga atau populasi mengalami ancaman serius terhadap konsumsi pangan dalam jangka pendek akibat konflik, bencana, guncangan ekonomi, atau faktor lain.

Ketahanan pangan

Kondisi ketika pangan tersedia, aman, bergizi, terjangkau, dan dapat diakses secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

Krisis pangan global

Situasi ketika sistem pangan dunia mengalami gangguan besar sehingga

memengaruhi ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan kualitas pangan di banyak negara.

Volatile food

Komponen inflasi yang terutama dipengaruhi komoditas pangan bergejolak, seperti akibat panen, cuaca, dan distribusi.

Daftar Pustaka

Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Tugas fungsi*.

Badan Pangan Nasional. (2026, January 12). *Ini strategi Bapanas di 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, December 5). *Bappenas dorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, February 19). *Perkuat strategi ketahanan pangan dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas jalin kolaborasi bersama IFPRI*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, August 20). *Bappenas dan FAO perkuat kolaborasi transformasi sistem pangan*.

Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Poverty rate continues to decline*.

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Paddy harvested area in 2025 was approximately 11.32 million hectares with 60.21 million tons of dry unhusked paddy (GKG) production*.

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *In February 2026, the National Wholesale Price Index (WPI) changed by 2.41 percent year-on-year*.

Bank Indonesia. (n.d.). *Inflation*.

Bank Indonesia. (2026, January 6). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran*.

Bank Indonesia. (2026, February 3). *CPI inflation under control in February 2026*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *SOFI 2025: FAO calls for urgent, coordinated and inclusive action to end global hunger*.

OECD. (2021). *Making better policies for food systems*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

World Bank. (2025, October 31). *Food Security Update*.

World Bank. (2025, December 15). *Indonesia Economic Prospects: Digital foundations for growth*.

World Bank. (2025, December 19). *Food Security Update*.

World Food Programme. (2025). *Global Report on Food Crises 2025*.

World Health Organization. (2026, January 26). *Healthy diet*.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 29 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c88f3f-3aec-8398-aafa-8b1f21da7991>